

Krisis di Wilayah Pendudukan Palestina (2024-2025): Sebuah Analisis Komprehensif tentang Bencana Kemanusiaan, Kerangka Hukum Internasional, dan Paradigma Keadilan Global

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan analisis komprehensif mengenai krisis yang berkembang di Wilayah Pendudukan Palestina (OPT) selama periode 2024-2025. Analisis ini mensintesis data kemanusiaan di lapangan dengan penilaian hukum internasional yang sistemik dan respons masyarakat sipil global yang terus berkembang.

Temuan-temuan utama terbagi dalam empat bidang kritis:

1. **Bencana Kemanusiaan:** Situasi di Jalur Gaza telah melampaui krisis kemanusiaan dan menjadi keruntuhan peradaban yang sistemik. Data dari Program Pangan Dunia (WFP) mengkonfirmasi **kelaparan (Famine - IPC Phase 5)** pada Agustus 2025¹, yang disebabkan oleh pembatasan bantuan dan penghancuran infrastruktur. Secara bersamaan, Doctors Without Borders (MSF) melaporkan bahwa 70% dari konsultasi medis di Gaza selatan adalah untuk penyakit yang terkait langsung dengan kondisi hidup yang buruk (misalnya, infeksi kulit, pernapasan, dan gastrointestinal), yang mengindikasikan kegagalan total sanitasi dan kesehatan masyarakat.² Di Tepi Barat, terjadi eskalasi paralel, dengan peningkatan 28% dalam cedera Palestina⁴ dan perang ekonomi yang ditargetkan melalui serangan pemukim terhadap panen zaitun.⁴
2. **Kerangka Hukum:** Terdapat konsensus yang menguat di antara lembaga-lembaga hukum dan hak asasi manusia internasional terkemuka bahwa status quo di OPT melanggar norma-norma paling fundamental dalam hukum internasional. Laporan-laporan dari Amnesty International, Human Rights Watch, dan B'Tselem telah secara hukum menetapkan bahwa kebijakan Israel merupakan **kejahatan apartheid**.⁵ Selain itu, para akademisi hukum¹⁰ dan studi PBB¹² berpendapat bahwa pendudukan itu sendiri telah menjadi **ilegal** karena pelanggarannya terhadap norma-norma *jus cogens*, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri. Puncak dari analisis hukum ini adalah kesimpulan pada Desember 2024 dari Amnesty International bahwa tindakan kumulatif Israel di Gaza—termasuk pemboman tanpa pandang bulu dan penciptaan kondisi kehidupan yang dimaksudkan untuk membawa kehancuran fisik—merupakan **kejahatan genosida**.¹⁴

3. **Pergeseran Wacana Global:** Krisis hukum dan kemanusiaan ini telah memicu pergeseran yang tak terbantahkan dalam masyarakat sipil global. Protes kampus global pada tahun 2024-2025¹⁶ mewakili penolakan generasi terhadap wacana "proses perdamaian" yang gagal, dan sebaliknya mengadopsi bahasa hukum internasional: apartheid, dekolonisasi, dan divestasi.¹⁹ Secara signifikan, pergeseran ini mencakup perpecahan dalam dukungan tradisional, terutama melalui organisasi-organisasi Yahudi anti-Zionis seperti Jewish Voice for Peace (JVP), yang secara strategis memisahkan identitas Yahudi dari Zionisme politik dan menuduh Israel sebagai negara apartheid.²⁰
4. **Paradigma Etika dan Diplomasi:** Laporan ini menyimpulkan dengan menganalisis kerangka kerja etika dan hukum Islam yang sering disalahpahami namun sangat relevan. Konsep-konsep seperti *'Adl* (Keadilan)²² dan *Rahmah* (Kasih Sayang Universal)²³ menyediakan landasan teologis untuk hak asasi manusia universal. Lebih lanjut, yurisprudensi Islam menawarkan kerangka kerja yang canggih untuk perlawanan non-kekerasan. *Jihad bil-Mal* (perjuangan ekonomi) telah dianalisis oleh para sarjana sebagai pembenaran teologis untuk boikot ekonomi, yang secara langsung sejajar dengan taktik gerakan BDS.²⁴ Akhirnya, model-model kenabian seperti Piagam Madinah²⁶ dan Perjanjian Hudaibiyah²⁸ menawarkan cetak biru sejarah untuk tata kelola multikultural berbasis hak dan diplomasi pragmatis, yang berfungsi sebagai sumber daya penting untuk membayangkan solusi yang adil dan langgeng.

Kesimpulannya, krisis 2024-2025 bukanlah tragedi yang terisolasi, melainkan hasil yang dapat diprediksi dari arsitektur hukum apartheid dan pendudukan ilegal. Solusi yang langgeng menuntut pembongkaran arsitektur ini dan realisasi hak menentukan nasib sendiri Palestina, sebuah tujuan yang didukung oleh konvergensi hukum internasional modern dan prinsip-prinsip etika Islam klasik.

Bagian 1: Anatomi Bencana Kemanusiaan (2024-2025)

Data dari badan-badan PBB dan organisasi non-pemerintah (NGO) internasional di lapangan selama tahun 2024 dan 2025 melukiskan gambaran situasi kemanusiaan yang telah runtuh di bawah tekanan gabungan dari operasi militer, blokade, dan penghancuran infrastruktur sipil. PBB meluncurkan Seruan Kilat (Flash Appeal) sebesar \$2,8 miliar untuk membantu tiga juta orang di Gaza dan Tepi Barat dari April hingga Desember 2024, menyoroti skala kebutuhan yang luar biasa.³⁰

1.1 Gaza: Kelaparan yang Direkayasa, Pengungsian Paksa, dan Runtuhnya Sistem Kesehatan

Situasi di Jalur Gaza telah berkembang dari krisis trauma perang menjadi keruntuhan peradaban yang sistemik. Per Oktober 2025, Doctors Without Borders (MSF) melaporkan bahwa lebih dari 67.000 warga Palestina telah terbunuh dan lebih dari 169.000 terluka.³¹ International Rescue Committee (IRC) mengkonfirmasi angka lebih dari 60.000 kematian.³² Di luar angka-angka ini, 44.000 anak telah menjadi yatim piatu.³¹

Kelaparan sebagai Metode Perang

Bencana kemanusiaan ini bukan merupakan produk sampingan yang tidak disengaja dari konflik, melainkan hasil dari kebijakan yang disengaja. Program Pangan Dunia (WFP) mengkonfirmasi pada Agustus 2025 bahwa Kelaparan (Famine - IPC Phase 5) telah terjadi di Kegubernuran Gaza dan diproyeksikan akan meluas.¹ Lebih dari setengah juta orang menghadapi kondisi bencana (IPC Phase 5), yang ditandai dengan kelaparan, kemelaratan, dan kematian. WFP mengaitkan ini secara langsung dengan "pembatasan ketat pada pengiriman" bantuan kemanusiaan.¹ Human Rights Watch (HRW) mendukung temuan ini dalam laporan Desember 2024 yang berjudul "Pemusnahan dan Tindakan Genosida: Israel Sengaja Merampas Air dari Warga Palestina di Gaza".⁷

Runtuhnya Sistem Kesehatan

Data MSF memberikan bukti paling jelas tentang keruntuhan sistemik. Pada tahun 2025, tim MSF melaporkan bahwa 70% dari semua konsultasi rawat jalan di pusat kesehatan mereka di Gaza selatan adalah untuk penyakit yang terkait langsung dengan kondisi hidup yang buruk: infeksi kulit, infeksi mata, infeksi saluran pernapasan, dan infeksi gastrointestinal.² Ini adalah indikator yang jelas dari keruntuhan total air bersih, sanitasi, dan kesehatan masyarakat.

MSF, dengan lebih dari 1.100 staf, telah dipaksa untuk beroperasi dalam kondisi yang sangat buruk.² Tim mereka menyediakan perawatan bedah, perawatan luka bakar, dan perawatan luka.³¹ Mereka telah membantu lebih dari 16.000 persalinan, seringkali dalam kondisi di mana perempuan terpaksa melahirkan di tenda-tenda plastik atau dipulangkan hanya beberapa jam setelah menjalani operasi caesar karena rumah sakit yang kewalahan.³³ Tim MSF berulang kali terpaksa merelokasi layanan—misalnya, memindahkan layanan dari Rumah Sakit Nasser yang diserang ke rumah sakit lapangan di Deir al-Balah—untuk melanjutkan perawatan ortopedi dan luka bakar.³³

Meskipun gencatan senjata diumumkan pada Oktober 2025³⁴, kondisi tetap mengerikan. MSF mencatat bahwa lebih dari satu juta warga Palestina masih terkurung di sebidang kecil tanah di Gaza selatan, seperti Al-Mawasi, dalam kondisi "zona kemanusiaan" yang padat dan tidak higienis.³ Penghancuran jaringan air Gaza oleh pasukan Israel telah memperburuk krisis kesehatan ini.³¹

1.2 Tepi Barat: Eskalasi Paralel dalam Kekerasan dan Perampasan

Situasi di Tepi Barat tidak statis selama krisis Gaza; sebaliknya, Tepi Barat mengalami eskalasi kekerasan dan perampasan yang disengaja dan paralel. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan bahwa hingga tahun 2025, lebih dari 3.200 warga Palestina telah terluka di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Ini merupakan peningkatan 28% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024, ketika lebih dari 2.500 cedera dicatat.⁴

Kekerasan Pemukim yang Didukung Negara

Kekerasan dari pemukim Israel, yang sering digambarkan oleh kelompok hak asasi manusia Israel B'Tselem sebagai "Kekerasan Pemukim = Kekerasan Negara"⁸, telah menjadi alat utama perampasan. Dalam satu minggu di bulan Oktober 2025, OCHA mencatat 71 serangan pemukim terhadap warga Palestina, yang mengakibatkan cedera pada 99 orang dan pengungsian sebuah keluarga.⁴

Serangan-serangan ini bukanlah tindakan kekerasan acak; serangan tersebut bersifat strategis. OCHA dan HRW secara eksplisit menghubungkan banyak dari serangan ini dengan perang ekonomi yang menargetkan mata pencaharian warga Palestina. OCHA melaporkan bahwa separuh dari serangan pemukim selama periode tersebut terkait dengan musim panen zaitun, yang berdampak pada 27 desa.⁴ HRW mengkonfirmasi bahwa otoritas Israel "sebagian besar melarang warga Palestina memanen zaitun pada tahun 2023 dan lagi pada tahun 2024, menyebabkan kerugian ekonomi".⁵ Tindakan ini secara efektif merupakan perampasan tanah yang dipercepat sementara perhatian global terfokus pada Gaza.

Pembatasan Akses Kesehatan

Mekanisme kontrol sistemik lainnya adalah penolakan akses ke layanan kesehatan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seperti yang dilaporkan oleh OCHA, satu dari tiga (1/3) dari lebih dari 55.800 aplikasi izin pasien Palestina yang diajukan antara Januari dan September 2025 untuk mengakses perawatan medis di Yerusalem Timur dan Israel ditolak atau ditunda.⁴ Ini menunjukkan penggunaan birokrasi kesehatan sebagai alat kontrol.

1.3 Respon Kemanusiaan: Aktor Kunci di Bawah Serangan

Respons kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat dipimpin oleh beberapa organisasi kunci yang beroperasi di bawah tekanan ekstrem, tidak hanya dari situasi perang tetapi juga dari serangan legislatif dan politik yang ditargetkan.

UNRWA (Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina)

UNRWA adalah tulang punggung respons kemanusiaan, terutama di Gaza. Didirikan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 302 (IV) pada tahun 1949, UNRWA memiliki mandat kemanusiaan dan pembangunan yang unik untuk menyediakan layanan inti seperti pendidikan dan kesehatan bagi sekitar 5,6 juta pengungsi Palestina, "menunggu solusi yang adil dan langgeng" untuk penderitaan mereka.³⁸ UNRWA adalah pemberi kerja terbesar PBB, dengan lebih dari 30.000 staf, 99% di antaranya adalah warga Palestina lokal.³⁹

Pada Oktober 2024, Knesset (parlemen) Israel mengesahkan undang-undang yang menetapkan UNRWA sebagai "kelompok teroris" dan melarang operasinya di Israel dan Yerusalem Timur, dengan undang-undang tersebut mulai berlaku pada awal 2025.³⁹ Serangan legislatif ini berpotensi menghentikan semua operasi UNRWA di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur, yang berdampak pada sekolah dan pusat kesehatan.⁴²

Tindakan ini memiliki implikasi politik yang mendalam. Penentangan lama Israel terhadap UNRWA didasarkan pada tuduhan bahwa badan tersebut "melanggengkan masalah pengungsi".³⁹ Oleh karena itu, pelarangan UNRWA lebih dari sekadar perselisihan pendanaan; ini adalah upaya politik untuk membongkar infrastruktur hukum dan fisik dari status pengungsi Palestina itu sendiri, yang terkait erat dengan hak untuk kembali. Terlepas dari tuduhan Israel yang menjadi dasar pelarangan tersebut, Mahkamah Internasional (ICJ) pada Oktober 2025 menemukan bahwa "Israel belum membuktikan tuduhannya" bahwa sebagian besar staf UNRWA adalah anggota faksi teroris.³⁹

ANERA (American Near East Refugee Aid)

ANERA adalah NGO kunci yang berfokus pada bantuan kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan di Palestina, Lebanon, dan Yordania.⁴⁴ Organisasi ini memiliki kredibilitas tinggi, dengan peringkat Bintang Empat 100% dari Charity Navigator 45 dan peringkat A- dari CharityWatch.⁴⁶ Model operasinya, yang mengirimkan bantuan senilai \$219 juta pada tahun 2024, menekankan solusi akar rumput dan mempekerjakan staf lokal untuk melayani komunitas mereka sendiri.³⁵

MSF (Doctors Without Borders)

Seperti yang dirinci dalam Bagian 1.1, MSF adalah penyedia layanan medis langsung di garis depan. Tim mereka tidak hanya memberikan perawatan kritis tetapi juga berfungsi sebagai saksi mata penting atas keruntuhan sistem kesehatan dan dampak sipil dari operasi militer.²

Tabel 1: Dasbor Krisis Kemanusiaan (Data 2024-2025)

Indikator	Wilayah	Statistik Kunci	Sumber
Kematian	Gaza	>67.000 (per Okt 2025)	31
Cedera	Gaza	>169.000 (per Okt 2025)	31
Cedera	Tepi Barat	>3.200 (Jan-Okt 2025)	4
Peningkatan Cedera	Tepi Barat	+28% (dibandingkan 2024)	4
Pengungsi Internal	Gaza	~3 juta (membutuhkan bantuan)	30
Status Kelaparan (IPC)	Gaza	Famine (IPC Phase 5) dikonfirmasi	1
Serangan Pemukim	Tepi Barat	71 serangan (dalam 1 minggu, Okt 2025)	4
Akses Kesehatan Ditolak	Tepi Barat	1 dari 3 izin pasien ditolak/ditunda	4
Pendanaan yang Dibutuhkan	OPT	US\$2,8 Miliar (Flash Appeal 2024)	30

Bagian 2: Arsitektur Hukum Penaklukan: Pendudukan Ilegal, Apartheid, dan Genosida

Krisis kemanusiaan yang terdokumentasi di Bagian 1 bukanlah hasil dari siklus kekerasan yang tidak dapat dijelaskan. Sebaliknya, krisis ini adalah gejala dari arsitektur hukum dan politik yang disengaja yang telah dianalisis secara ekstensif oleh badan-badan hukum internasional, akademisi, dan organisasi hak asasi manusia terkemuka. Analisis mereka menyimpulkan bahwa rezim Israel di Wilayah Pendudukan Palestina (OPT) melanggar tiga pilar hukum internasional: larangan pendudukan ilegal, larangan apartheid, dan larangan genosida.

2.1 Status Pendudukan yang Melanggar Hukum: Pelanggaran *Jus Cogens*

Pendudukan Israel atas Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur sejak Perang 1967⁴⁷ adalah pendudukan militer terpanjang dalam sejarah modern.⁴⁸ Selama beberapa dekade, wacana politik berpusat pada "proses perdamaian" yang menganggap pendudukan itu sementara dan sah, menunggu penyelesaian yang dinegosiasikan.

Namun, konsensus hukum yang muncul, seperti yang diartikulasikan dalam studi PBB (UNISPAL)¹² dan jurnal hukum terkemuka seperti *European Journal of International Law* (EJIL)¹⁰, berpendapat bahwa pendudukan itu sendiri telah menjadi **ilegal** menurut hukum internasional.

Ilegalitas ini tidak hanya didasarkan pada durasinya yang diperpanjang⁴⁸, tetapi pada pelanggaran terhadap *jus cogens*—norma-norma peremptory hukum internasional yang tidak dapat dilanggar oleh negara mana pun. Tiga norma *jus cogens* utama yang dilanggar adalah:

1. **Larangan Perolehan Wilayah dengan Paksa:** Studi PBB¹² dan analisis akademis⁴⁸ mengidentifikasi aneksasi *de jure* Israel atas Yerusalem Timur dan aneksasi *de facto* atas Area C di Tepi Barat melalui perluasan pemukiman besar-besaran sebagai pelanggaran langsung terhadap norma ini.
2. **Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri:** Penyangkalan sistematis terhadap hak kolektif rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri—sebuah hak yang diakui sebagai norma *erga omnes*¹¹—merupakan pelanggaran *jus cogens*.¹²

3. **Larangan Apartheid:** Seperti yang dirinci di bawah ini, penerapan rezim apartheid itu sendiri merupakan pelanggaran *jus cogens*.¹²

Pendapat Penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2024-2025⁵² semakin memperkuat analisis ini, dengan membahas konsekuensi hukum yang timbul dari kebijakan dan praktik Israel.

Implikasi dari pergeseran paradigma ini sangat mendalam. Jika pendudukan itu ilegal, maka itu bukan lagi "sengketa" atas tanah yang akan dinegosiasikan di bawah kerangka kerja seperti Kesepakatan Oslo.⁵⁵ Sebaliknya, itu menjadi situasi yang melanggar hukum yang harus diakhiri tanpa syarat. Pergeseran ini membebaskan kewajiban hukum pada semua negara ketiga untuk tidak mengakui atau memberikan bantuan kepada situasi ilegal tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, yang menyerukan negara-negara untuk "membedakan" antara Israel dan wilayah pendudukan.⁴⁸

2.2 Analisis Hukum Kejahatan Apartheid

Selama beberapa tahun terakhir, konsensus telah terbentuk di antara organisasi hak asasi manusia Palestina, Israel, dan internasional bahwa kebijakan Israel terhadap Palestina bukan hanya diskriminatif tetapi merupakan **kejahatan apartheid** terhadap kemanusiaan.

Apartheid bukanlah metafora untuk diskriminasi rasial; itu adalah kejahatan internasional yang didefinisikan secara hukum, terutama dalam Statuta Roma Pengadilan Kriminal Internasional, sebagai "tindakan tidak manusiawi... yang dilakukan dalam konteks rezim opresi dan dominasi sistematis yang terlembaga oleh satu kelompok ras atas kelompok ras lainnya, dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu".⁹

- **Amnesty International:** Dalam laporan komprehensif tahun 2022, Amnesty menyimpulkan bahwa Israel memberlakukan "sistem apartheid yang kejam berupa dominasi" terhadap rakyat Palestina.⁶
- **Human Rights Watch (HRW):** Laporan HRW tahun 2021, "A Threshold Crossed"⁷, dan World Report 2025⁵ menemukan bahwa otoritas Israel melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa apartheid dan persekusi.
- **B'Tselem (Organisasi Israel):** Pada tahun 2021, B'Tselem secara terbuka menyatakan bahwa mereka menganalisis seluruh wilayah "antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania" sebagai diatur oleh "rezim apartheid Israel" tunggal.⁸

Mekanisme apartheid ini, yang didokumentasikan oleh organisasi-organisasi ini, meliputi:

- **Sistem Hukum Ganda:** Di Tepi Barat, pemukim Israel diatur oleh hukum sipil Israel, sementara warga Palestina yang tinggal di tanah yang sama diatur oleh hukum militer yang menindas.⁵
- **Perampasan Tanah dan Pembatasan Gerakan:** Pembangunan Tembok Pemisah (85% di antaranya berada di dalam Tepi Barat), proliferasi pos pemeriksaan, dan sistem izin yang rumit⁵ yang oleh OCHA catat menolak akses medis bagi satu dari tiga pasien.⁴
- **Diskriminasi yang Terlembaga:** Kiriman dari International Human Rights Clinic di Harvard Law School ke PBB pada tahun 2022 menemukan bahwa tindakan Israel di Tepi Barat "melanggar larangan apartheid dan merupakan kejahatan apartheid menurut hukum internasional".⁵⁷

Penetapan apartheid ini secara fundamental mengubah pemahaman tentang konflik. Ini menyatukan pengalaman warga Palestina yang terfragmentasi di Gaza, Tepi Barat, dan di dalam Israel sebagai korban dari satu rezim tunggal yang didedikasikan untuk dominasi rasial.⁸

2.3 Investigasi Genosida

Tuduhan paling serius menurut hukum internasional adalah genosida. Pada Desember 2024, setelah analisis ekstensif terhadap operasi militer Israel di Gaza, **Amnesty International** secara resmi menyimpulkan bahwa Israel "sedang melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza".¹⁴ Kelompok hak asasi manusia Israel **B'Tselem** juga menyatakan bahwa Israel telah "melakukan genosida di Jalur Gaza" selama hampir dua tahun dan memperingatkan risiko perluasannya ke Tepi Barat.⁸

Analisis hukum genosida membutuhkan bukti dari dua elemen: *actus reus* (tindakan genosida) dan *mens rea* (niat untuk menghancurkan).

1. **Tindakan Genosida (Actus Reus):** Laporan Amnesty mendokumentasikan tindakan-tindakan terlarang di bawah Konvensi Genosida, termasuk:
 - **Pembunuhan:** Seperti serangan udara pada 20 April 2024 yang menghancurkan rumah keluarga Abdelal di Rafah, menewaskan tiga generasi, termasuk 16 anak.¹⁵
 - **Menyebabkan Kerusakan Tubuh atau Mental yang Serius:** Melalui pemboman tanpa pandang bulu.¹⁵
 - **Sengaja Menciptakan Kondisi Kehidupan untuk Membawa Kehancuran Fisik:** Ini adalah elemen krusial yang menghubungkan temuan hukum dengan data kemanusiaan di Bagian 1. "Kondisi kehidupan" ini adalah **kelaparan** yang dikonfirmasi oleh WFP¹, perampasan air yang disengaja yang diidentifikasi oleh HRW⁷, dan **wabah penyakit** akibat keruntuhan sanitasi yang didokumentasikan oleh MSF.³

2. **Niat Genosida (Mens Rea):** Amnesty berpendapat bahwa "niat genosida adalah satu-satunya kesimpulan yang masuk akal" ketika melihat *dampak kumulatif* dari tindakan-tindakan ini dan *pernyataan-pernyataan* yang dibuat oleh pejabat senior pemerintah dan militer Israel.¹⁵

Konteks apartheid yang sudah ada sebelumnya (dianalisis dalam 2.2) sangat penting untuk membangun niat. Ketika sebuah negara telah melembagakan sistem (apartheid) yang secara hukum dan sosial mendefinisikan kelompok lain sebagai bawahan atau "subhuman" ⁹, "niat untuk menghancurkan" di balik tindakan seperti pemboman karpet dan kelaparan yang disengaja menjadi lebih dapat dibuktikan secara hukum. Genosida bukanlah tindakan yang terisolasi; dalam konteks ini, genosida adalah ekspresi akhir yang mungkin dari rezim apartheid.

2.4 Mekanisme Kontrol: Penahanan Sewenang-wenang dan Penyiksaan

Arsitektur hukum penaklukan ini ditegakkan melalui sistem penahanan dan hukuman kolektif yang beroperasi di luar norma-norma proses hukum.

Per Desember 2024, kelompok hak asasi manusia Israel B'Tselem mencatat bahwa Israel menahan 9.619 warga Palestina sebagai tahanan "keamanan" ⁶⁰, termasuk 2.216 dari Jalur Gaza.⁶¹ Sistem ini menciptakan "lubang hitam hukum" melalui dua mekanisme utama:

1. **Penahanan Administratif:** Pada akhir 2024, 3.327 warga Palestina ditahan dalam penahanan administratif ⁶², sebuah praktik di mana tahanan ditahan tanpa dakwaan, tanpa pengadilan, dan tanpa kemampuan untuk menentang bukti terhadap mereka.⁵
2. **Undang-Undang Kombatan yang Melanggar Hukum:** Pada Juni 2024, 1.415 warga Palestina dari Gaza ditahan di bawah undang-undang ini, yang oleh HRW digambarkan sebagai "suatu bentuk penahanan administratif" lainnya.⁵

Di dalam sistem yang buram ini, penyiksaan dan perlakuan buruk bersifat sistemik. Laporan B'Tselem tahun 2024, "Welcome to Hell," mendokumentasikan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan Palestina.⁵⁹ HRW menguatkan hal ini, melaporkan penggunaan penyiksaan, kekerasan seksual, dan penolakan perawatan medis terhadap tahanan.⁵ HRW secara khusus menyoroti tuduhan pemerkosaan di pangkalan militer Sde Teiman.⁵

Impunitas untuk pelanggaran ini dipastikan dengan menolak akses pemantauan independen. Sejak Oktober 2023, Israel telah menolak akses ke fasilitas penahanan, termasuk untuk Komite Internasional Palang Merah (ICRC).⁵

Untuk analisis yang seimbang, penting untuk dicatat bahwa pelanggaran hak asasi manusia juga dilakukan oleh otoritas Palestina. HRW⁵ dan Amnesty International⁶³ mencatat bahwa Otoritas Palestina (PA) di Tepi Barat secara sewenang-wenang menahan para penentang dan kritikus. Antara Januari dan November 2024, pengawas hak asasi manusia independen Palestina menerima 231 keluhan tentang penangkapan sewenang-wenang dan 117 keluhan tentang penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap PA.⁵

Tabel 2: Konvergensi Temuan Hukum Internasional (2021-2025)

Badan Hukum/HAM	Kejahatan Apartheid	Status Pendudukan Ilegal	Kejahatan Genosida
Amnesty International	Ya ⁶	(Terkait dengan apartheid)	Ya ¹⁴
Human Rights Watch	Ya ⁵	(Terkait dengan apartheid)	Ya ("Tindakan Genosida") ⁷
B'Tselem (Israel)	Ya ⁸	(Implisit dalam rezim apartheid)	Ya ⁸
Harvard Law IHRC	Ya ⁵⁷	T/A	T/A
Studi PBB (UNISPAL)	Ya ¹²	Ya (Pelanggaran <i>Jus Cogens</i>) ¹²	T/A
Akademisi (EJIL)	T/A	Ya (Pelanggaran <i>Jus Cogens</i>) ¹⁰	T/A

Bagian 3: Gema Global: Perlawanan Non-Kekerasan dan Pergeseran Wacana

Konsensus hukum yang dijelaskan di Bagian 2, ditambah dengan realitas kemanusiaan di Bagian 1, telah memicu pergeseran mendalam dalam masyarakat sipil global. Narasi lama tentang "konflik dua sisi" dan "proses perdamaian" yang disponsori AS⁵⁵ telah runtuh, digantikan oleh bahasa hukum internasional, dekolonisasi, dan akuntabilitas.

3.1 Pemberontakan Kampus (2024-2025): Generasi Baru Aktivisme

Dimulai secara signifikan pada April 2024, gelombang protes pro-Palestina meletus di universitas-universitas di Amerika Serikat, dimulai dari Universitas Columbia, dan dengan cepat menyebar secara global.¹⁶ Perkemahan dan pendudukan muncul di kampus-kampus di Australia, Prancis, Belanda, Inggris, dan di 45 negara bagian AS.¹⁶

Tuntutan Inti

Protes ini menandai penolakan generasi terhadap keterlibatan institusional. Tuntutan inti para mahasiswa bersifat konsisten dan berakar pada hukum 19:

1. **Divestasi (Divestment):** Tuntutan utama adalah agar universitas melakukan divestasi finansial dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam atau mendapat untung dari pendudukan Israel dan perang di Gaza.¹⁶
2. **Transparansi Keuangan:** Para mahasiswa menuntut transparansi dalam investasi dana abadi universitas.¹⁶
3. **Pemutusan Hubungan Akademik:** Seruan untuk mengakhiri kemitraan dengan institusi-institusi Israel.¹⁶

Metode dan Konteks

Metode yang digunakan—perkemahan, pendudukan, mogok makan, dan pembangkangan sipil 18—secara eksplisit mengambil inspirasi dari gerakan anti-Perang Vietnam dan anti-apartheid Afrika Selatan.¹⁶ Terlepas dari gambaran media, diperkirakan 97% protes di AS tetap non-kekerasan.¹⁶

Tantangan Balik (Backlash) dan "Lawfare"

Administrasi universitas dan politisi merespons dengan keras, seringkali menggunakan Definisi Antisemitisme IHRA yang kontroversial untuk menekan pidato.⁶⁵ Para kritikus, termasuk

mahasiswa yang terlibat (banyak di antaranya adalah orang Yahudi 16), berpendapat bahwa definisi ini "mencampuradukkan kritik terhadap Israel dengan antisemitisme" dan digunakan sebagai alat untuk membungkam ekspresi politik yang sah.⁶⁵

3.2 Gerakan BDS: Analisis Hukum dan Politik

Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) berfungsi sebagai landasan intelektual dan strategis bagi banyak aktivisme saat ini. Diluncurkan pada tahun 2005 oleh koalisi masyarakat sipil Palestina, BDS adalah gerakan non-kekerasan yang terinspirasi oleh perjuangan anti-apartheid Afrika Selatan.⁵⁸

Kekuatan gerakan BDS terletak pada landasan *hukumnya*. Ini bukan seruan untuk solusi politik baru, melainkan tuntutan untuk kepatuhan Israel terhadap *hukum internasional yang ada*.⁵⁸

Tiga tuntutan inti BDS adalah ⁵⁸:

1. Mengakhiri pendudukan dan kolonisasi tanah Arab.
2. Kesetaraan penuh bagi warga negara Arab-Palestina di Israel.
3. Menghormati hak kembali pengungsi Palestina sebagaimana diatur dalam Resolusi PBB 194.

Gerakan ini secara inheren bersifat politik, bukan "beranimasi rasial" ⁶⁷, dan telah memicu perdebatan sengit di gereja, serikat pekerja, dan universitas.⁶⁷ Sebagai tanggapan, upaya legislatif yang signifikan, yang dikenal sebagai undang-undang anti-BDS, telah diperkenalkan untuk menghukum individu atau perusahaan yang berpartisipasi dalam boikot terhadap Israel.⁶⁷ Upaya "perang hukum" (lawfare) balasan ini telah ditantang di pengadilan, dengan beberapa putusan yang menegaskan bahwa boikot politik terhadap negara asing merupakan bentuk ekspresi yang dilindungi oleh Amandemen Pertama di AS.⁶⁶

3.3 Pergeseran Lanskap Berbasis Agama: Solidaritas Anti-Zionis dan Antaragama

Salah satu perkembangan paling signifikan dalam pergeseran wacana ini adalah keretakan dalam front yang sebelumnya **monolitik, terutama dalam komunitas berbasis agama**.

Jewish Voice for Peace (JVP)

JVP telah muncul sebagai organisasi Yahudi progresif anti-Zionis terbesar di dunia.²⁰ Identitas

JVP secara strategis sangat penting. Organisasi ini secara eksplisit:

- Mendukung kampanye BDS.²⁰
- Menyatakan bahwa Zionisme kontemporer telah menjadi "gerakan kolonial-pemukim" dan bahwa Israel adalah "negara apartheid".²⁰
- Mendasarkan anti-Zionisme-nya pada nilai-nilai Yahudi, berjuang untuk "memisahkan" Yudaisme dari Zionisme politik.²¹

Peran strategis JVP, dalam kata-kata mereka sendiri, adalah untuk bertindak sebagai "penyeimbang bagi dukungan Zionis Yahudi terhadap apartheid Israel" dan "mengguncang aliansi AS-Israel".²¹ Munculnya suara Yahudi yang anti-Zionis secara vokal telah memberikan perlindungan politik yang kritis bagi para aktivis dan politisi, yang mempersulit penggunaan tuduhan antisemitisme untuk membungkam semua kritik terhadap Israel.⁷¹

Gerakan Antaragama: Dari Dialog ke Solidaritas

Telah terjadi pergeseran nyata dalam ruang antaragama. Seperti yang dicatat dalam diskusi yang diselenggarakan oleh HRW, ada gerakan "lulus dari dialog antaragama ke solidaritas dan kerja sama antaragama".⁷²

Gerakan ini secara aktif menantang apa yang disebut "faithwashing"—penggunaan dialog antaragama untuk "menutupi kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina" dan "menghapus penderitaan Palestina".⁷³ Alih-alih berfokus hanya pada dialog, kelompok-kelompok agama ini, yang sering didorong oleh kesaksian mitra Kristen Palestina mereka, secara resmi mengadopsi bahasa hukum internasional. Organisasi-organisasi seperti United Church of Christ dan Disciples of Christ telah mengeluarkan resolusi yang menyebut tindakan Israel sebagai **apartheid**.⁷²

Bagian 4: Membingkai Ulang Perlawanan: Keadilan, Diplomasi, dan Jihad dalam Etika Islam

Sementara analisis hukum internasional (Bagian 2) dan perlawanan masyarakat sipil (Bagian 3) sangat penting, pemahaman komprehensif tentang konflik ini juga menuntut keterlibatan dengan kerangka kerja etika dan hukum dari dalam tradisi Islam. Wacana ini sering disalahpahami atau disederhanakan secara keliru di Barat menjadi stereotip kekerasan.⁷⁴ Namun, tradisi Islam menawarkan sumber daya yang canggih untuk keadilan universal, perlawanan non-kekerasan, dan tata kelola multikultural.

4.1 Etika Dasar: 'Adl (Keadilan) dan Rahmah (Kasih Sayang)

Dua prinsip Al-Qur'an menjadi landasan kerangka etika Islam untuk keadilan global:

1. **Prinsip Keadilan ('Adl):** Surah Al-Ma'idah, ayat 8, memerintahkan: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil...".²² Cendekiawan kontemporer menafsirkan ini sebagai mandat yang tidak dapat dinegosiasikan untuk menghormati hak-hak dasar dan kesetaraan di depan hukum, terlepas dari etnis, agama, atau status sosial.²² Ini adalah dasar teologis untuk menuntut keadilan sosial dan hak asasi manusia universal.⁷⁶ Dalam ontologi Islam, keadilan ('*adl*) adalah prasyarat untuk perdamaian sejati.⁷⁹
2. **Prinsip Kasih Sayang Universal (Rahmah):** Surah Al-Anbiya, ayat 107, mendefinisikan misi kenabian: "Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai *rahmatan lil-'alamin*—rahmat bagi seluruh alam".⁸⁰ Konsep ini melampaui batas-batas komunitas Muslim. Para sarjana modern menghubungkan *rahmah* (kasih sayang) dengan *fiqh al-ta'ayush* (fiqih hidup berdampingan)⁸³ dan nilai-nilai toleransi dan kebebasan beragama.⁸⁴ Ini telah diajukan sebagai landasan etika Islam untuk prinsip-prinsip kemanusiaan internasional modern.²³

Bersama-sama, '*Adl* menyediakan dasar hukum internal untuk akuntabilitas, sementara *Rahmah* menyediakan imperatif kemanusiaan universal.

4.2 Rekontekstualisasi Jihad: Upaya, Pembelaan Diri, dan Ekonomi

Istilah "Jihad" (usaha atau perjuangan) adalah salah satu konsep yang paling disalahpahami dalam wacana Barat, sering kali secara keliru diterjemahkan sebagai "perang suci".⁸⁶ Dalam teologi Islam klasik, konsep ini memiliki banyak lapisan:

- ***Al-Jihad al-Akbar* (Jihad Besar):** Dianggap sebagai bentuk jihad yang lebih tinggi, ini adalah perjuangan spiritual internal melawan hawa nafsu.⁸⁶
- ***Al-Jihad al-Asghar* (Jihad Kecil):** Ini mengacu pada perjuangan fisik, atau *qital* (pertempuran bersenjata).⁸⁶

Jihad sebagai Pembelaan Diri (Jus ad Bellum)

Analisis akademis terhadap Al-Qur'an, termasuk dari Yaqeen Institute 89 dan jurnal-jurnal yang berfokus pada militer 75, berpendapat bahwa justifikasi untuk *qital* secara ketat bersifat

defensif, sejajar dengan teori perang yang adil Barat. Izin pertama untuk berperang dalam Al-Qur'an diberikan kepada mereka "yang telah dizalimi" dan diusir dari rumah mereka.⁸⁹ Kerangka kerja ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional modern tentang pembelaan diri yang sah, seperti yang diabadikan dalam Pasal 51 Piagam PBB.⁸⁹ Jihad Non-Kekerasan (Lisan & Harta)

Lebih relevan dengan perlawanan kontemporer adalah bentuk-bentuk jihad non-militer:

- **Jihad bil-Lisan/Qalam (Jihad dengan Lidah/Pena):** Didefinisikan sebagai "berbicara kebenaran" ⁸⁷ dan terlibat dalam "perjuangan verbal dan diskursif".⁸⁶ Ini memberikan kerangka teologis untuk pekerjaan advokasi hak asasi manusia, jurnalisme, dan protes intelektual yang terlihat dalam gerakan solidaritas global (Bagian 3.1).
- **Jihad bil-Mal (Jihad dengan Harta/Ekonomi):** Ini adalah wawasan kritis yang menghubungkan teologi Islam klasik dengan aktivisme modern. Cendekiawan kontemporer ²⁴ secara eksplisit menganalisis boikot ekonomi sebagai bentuk "jihad finansial." Fiqih (yurisprudensi Islam) ²⁵ membahasnya sebagai taktik yang sah secara situasional (*mandub* atau direkomendasikan). Keabsahannya bergantung pada tujuannya—untuk "menimbulkan kerugian ekonomi pada musuh tanpa menyebabkan kerugian pada Muslim" ²⁴—dan pada ketersediaan produk alternatif yang memadai, sehingga boikot tersebut praktis dan tidak merugikan diri sendiri.²⁵

Secara efektif, yurisprudensi Islam tentang *Jihad bil-Mal* menyediakan kerangka teologis yang sah untuk gerakan BDS (Bagian 3.2). Ini menawarkan bentuk perlawanan non-kekerasan yang kuat dan sah secara Islam, yang sepenuhnya terpisah dari stereotip kekerasan yang sering dikaitkan dengan konsep jihad.⁹³

4.3 Kenegarawanan Profetik: Model untuk Tata Kelola dan Diplomasi

Tradisi Islam juga menawarkan preseden sejarah yang kuat dalam kenegarawanan dan diplomasi yang berfungsi sebagai cetak biru untuk resolusi konflik modern.

Studi Kasus 1: Piagam Madinah (Tata Kelola Multikultural)

Setelah hijrahnya Nabi Muhammad (SAW) ke Madinah, beliau tidak memaksakan hukum sektarian. Sebaliknya, beliau memfasilitasi "kontrak sosial pertama" dalam sejarah 27, yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Analisis ilmu politik terhadap dokumen ini 26 menyoroti prinsip-prinsip revolusionernya:

- Piagam tersebut diadopsi melalui **konsensus** oleh masyarakat multi-agama yang beragam yang mencakup Muslim, Yahudi, dan pagan.²⁷
- Piagam tersebut mendirikan *ummah* (komunitas) sipil yang melampaui kesukuan,

berdasarkan nilai-nilai bersama, keadilan, kesetaraan hak, dan, yang terpenting, **kebebasan beragama** dan otonomi hukum bagi komunitas Yahudi.⁹⁸

Piagam Madinah menawarkan preseden sejarah langsung untuk negara kesatuan, multikultural, dan berbasis hak—sebuah antitesis langsung terhadap model apartheid⁵⁵—di mana semua warga negara, termasuk Yahudi, memiliki hak dan perlindungan yang dijamin.

Studi Kasus 2: Perjanjian Hudaibiyah (Diplomasi Pragmatis)

Perjanjian Hudaibiyah adalah studi kasus mani dalam Siyar (hukum internasional Islam) 101 dan Fiqh al-Mu'ahadat (hukum perjanjian).¹⁰³ Perjanjian ini menunjukkan diplomasi kenabian yang ditandai oleh:

- **Kompromi Strategis:** Nabi Muhammad (SAW) menerima syarat-syarat yang pada awalnya tampak tidak menguntungkan dan memalukan bagi para pengikutnya.¹⁰⁴
- **Visi Jangka Panjang:** Beliau memprioritaskan *maslahah* (kepentingan publik) jangka panjang dan de-eskalasi di atas keuntungan jangka pendek.²⁸
- **Pragmatisme dan Kepatuhan pada Perjanjian:** Perjanjian tersebut menegaskan prinsip *pacta sunt servanda* (kewajiban untuk memenuhi perjanjian)¹⁰⁵ dan menunjukkan negosiasi pragmatis untuk mencapai perdamaian.²⁹

Perjanjian Hudaibiyah menyediakan metodologi diplomatik—pragmatisme, kesabaran strategis, dan komitmen pada hukum perjanjian—yang membantah narasi bahwa kerangka kerja Islam pada dasarnya kaku atau tidak sesuai dengan negosiasi internasional modern.¹⁰⁵

Tabel 3: Kerangka Kerja Islam untuk Perlawanan dan Diplomasi Non-Kekerasan

Konsep Islam	Sumber Tekstual (Dasar)	Makna Inti	Aplikasi Kontemporer yang Relevan
Jihad al-Nafs (Jihad Besar)	Hadits	Perjuangan spiritual internal melawan hawa nafsu	Pengembangan etika pribadi dan kesabaran
Jihad bil-Lisan/Qalam (Lidah/Pena)	Hadits; Al-Qur'an ⁸⁶	Perjuangan advokasi, intelektual, "berbicara kebenaran"	Protes kampus, pelaporan HAM, aktivisme (Bagian 3)

Jihad bil-Mal (Harta/Ekonomi)	Fiqih ²⁴	Perjuangan ekonomi untuk melemahkan penindasan	Gerakan Boikot, Divestasi, Sanksi (BDS) (Bagian 3.2)
Qital (Jihad Kecil)	Al-Qur'an (Izin) ⁸⁹	Pertempuran fisik	<i>Jus ad bellum</i> : Pembelaan diri yang sah (misalnya, Pasal 51 Piagam PBB)
Piagam Madinah	Dokumen Sejarah ²⁷	Tata kelola multikultural, hak sipil, kebebasan beragama	Model untuk solusi satu negara yang berbasis hak (alternatif untuk apartheid)
Perjanjian Hudaibiyah	Dokumen Sejarah ²⁹	Diplomasi pragmatis, hukum perjanjian, de-eskalasi	Model untuk negosiasi resolusi konflik

Bagian 5: Kesimpulan dan Jalan ke Depan

Sintesis dari analisis ini mengarah pada kesimpulan yang tak terhindarkan. Bencana kemanusiaan yang terdokumentasi di Gaza dan Tepi Barat selama 2024-2025 (Bagian 1) bukanlah tragedi yang terisolasi atau siklus kekerasan yang tak terhindarkan. Ini adalah hasil yang dapat diprediksi dan disengaja dari arsitektur hukum (Bagian 2) dari pendudukan militer yang berkepanjangan yang telah menjadi ilegal menurut hukum internasional ¹⁰, rezim apartheid yang terlembaga yang diakui oleh badan-badan hak asasi manusia terkemuka ⁸, dan, seperti yang sekarang dituduhkan oleh Amnesty International dan B'Tselem, pelaksanaan tindakan genosida.¹⁵

Bencana moral dan hukum ini telah memicu pergeseran yang tak terbantahkan dalam masyarakat sipil global (Bagian 3). Wacana "proses perdamaian" yang didominasi oleh perantara kekuasaan telah runtuh, digantikan oleh tuntutan non-kekerasan dari generasi baru yang didasarkan pada bahasa hukum internasional, dekolonisasi, dan akuntabilitas. Munculnya

suara-suara Yahudi anti-Zionis yang terorganisir ²⁰ dan pergeseran ruang antaragama dari dialog ke solidaritas ⁷² menandakan perpecahan mendalam dalam pilar-pilar dukungan politik yang telah lama menopang status quo.

Melihat ke depan, jelas bahwa solusi yang langgeng tidak dapat dicapai hanya melalui bantuan kemanusiaan, betapapun pentingnya bantuan itu. Bantuan hanya mengobati gejala. Solusi yang adil menuntut pembongkaran total arsitektur hukum apartheid dan pemenuhan penuh hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina ⁴⁹, yang telah lama diakui oleh hukum internasional.

Kerangka kerja etika dan hukum Islam (Bagian 4) bukanlah penghalang untuk tujuan ini, seperti yang sering digambarkan. Sebaliknya, kerangka kerja tersebut adalah sumber daya yang canggih dan vital. Kerangka kerja tersebut menyediakan landasan berprinsip untuk keadilan universal ('*Adl*') ²², alat-alat perlawanan non-kekerasan yang sah secara teologis seperti boikot ekonomi (*Jihad bil-Mal*) ²⁴, dan, yang terpenting, cetak biru sejarah yang teruji untuk satu negara multikultural yang adil di mana semua warga negara—Yahudi, Kristen, dan Muslim—dapat hidup dengan hak dan martabat yang setara, seperti yang dibayangkan dalam Piagam Madinah.²⁶ Jalan ke depan menuntut agar komunitas internasional beralih dari mengelola pendudukan ilegal menjadi menegakkan hukum internasional.

Kaya Dikutip

1. Palestine | World Food Programme, accessed October 30, 2025, <https://www.wfp.org/emergencies/palestine-emergency>
2. Palestine | Doctors Without Borders - USA, accessed October 30, 2025, <https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/where-we-work/palestine>
3. Post-ceasefire, Palestinians in Gaza are still living in dire conditions, accessed October 30, 2025, <https://www.doctorswithoutborders.org/latest/post-ceasefire-palestinians-gaza-are-still-living-dire-conditions>
4. Humanitarian Situation Update #332 | West Bank [EN/AR/HE] | OCHA, accessed October 30, 2025, <https://www.unocha.org/publications/report/occupied-palestinian-territory/humanitarian-situation-update-332-west-bank-enarhe>
5. World Report 2025: Israel and Palestine | Human Rights Watch, accessed October 30, 2025, <https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/israel-and-palestine>
6. Human rights in Israel and the Occupied Palestinian Territory - Amnesty International, accessed October 30, 2025, <https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/middle-east/israel-and-the-occupied-palestinian-territory/report-israel-and-the-occupied-palestinian-territory/>
7. UN: End Impunity for Israeli Crimes Against Palestinians | Human Rights Watch, accessed October 30, 2025, <https://www.hrw.org/news/2025/07/22/un-end-impunity-for-israeli-crimes-against-palestinians>
8. Statistics | B'Tselem, accessed October 30, 2025, <https://www.btselem.org/statistics>
9. Israel's apartheid against Palestinians: a cruel system of domination and a crime against humanity - Amnesty International, accessed October 30, 2025, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/>
10. On the United Nations and the Illegal Occupation of Palestine, 1967–2020 - EJIL, accessed October 30, 2025, <https://www.ejil.org/article.php?article=3078&issue=153>
11. Negotiating the Illegal: On the United Nations and the Illegal Occupation of Palestine, 1967–2020 | European Journal of International Law | Oxford Academic, accessed October 30, 2025, <https://academic.oup.com/ejil/article/31/3/1055/5903619>
12. Study on the Legality of the Israeli Occupation of the Occupied ..., accessed October 30, 2025, <https://www.un.org/unispal/document/ceirpp-legal-study2023/>
13. Study: Legality of the Israeli Occupation of the Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem - ReliefWeb, accessed October 30, 2025, <https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/study-legality-israeli-occupation-occupied-palestinian-territory-including-east-jerusalem>

14. Human rights in Israel and the Occupied Palestinian Territory - Amnesty International, accessed October 30, 2025, <https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/middle-east/israel-and-the-occupied-palestinian-territory/>
15. Amnesty concludes Israel is committing genocide in Gaza, accessed October 30, 2025, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/12/amnesty-international-concludes-israel-is-committing-genocide-against-palestinians-in-gaza/>
16. 2024 pro-Palestinian protests on university campuses - Wikipedia, accessed October 30, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/2024_pro-Palestinian_protests_on_university_campuses
17. Mapping pro-Palestine college campus protests around the world ..., accessed October 30, 2025, <https://www.aljazeera.com/news/2024/4/29/mapping-pro-palestine-campus-protests-around-the-world>
18. List of pro-Palestinian protests on university campuses in 2024 - Wikipedia, accessed October 30, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pro-Palestinian_protests_on_university_campuses_in_2024
19. US University Campuses Will Stifle Students' Protests Next Year, accessed October 30, 2025, <https://arabcenterdc.org/resource/us-university-campuses-will-stifle-students-protests-next-year/>
20. Jewish Voice for Peace - Wikipedia, accessed October 30, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Voice_for_Peace
21. About - JVP - Jewish Voice for Peace, accessed October 30, 2025, <https://www.jewishvoiceforpeace.org/about/>
22. QS. Al-Maidah Verse 8: A Reflection on Prophetic Justice | Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law, accessed October 30, 2025, <https://proceedings.ums.ac.id/icrtlaw/article/view/5700>
23. (PDF) "Rahmatan lil-'alamin" (A mercy to all creation): Islamic voices ..., accessed October 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/392896499_Rahmatan_lil-'alamin_A_mercy_to_all_creation_Islamic_voices_in_the_debate_on_humanitarian_principles
24. Consumer Boycotts and Jurisprudential Challenges Related to Identifying Their Legal Cause ('Illah) - DergiPark, accessed October 30, 2025, <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3774158>
25. (PDF) Economic Boycott from the Islamic Law Perspective: A Post ..., accessed October 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/386092519_Economic_Boycott_from_the_Islamic_Law_Perspective_A_Post-Tufan_al-Aqsa_Case_Study
26. Madinah Charter and Peace Building Community - Allied Business Academies, accessed October 30, 2025, <https://www.abacademies.org/articles/madinah-charter-and-peace-building-community-15181.html>
27. The Constitution of Medina First Application of Qur'anic Principles in Governance, accessed October 30, 2025, <https://iqra.study/the-constitution-of-medina-first->

- [application-of-quranic-principles-in-governance/](#)
28. The Hudaibiyah Treaty as a Model for International Treaty Law: Analysis of Siyasaḥ Fiqh and its Relevance for Public Law, accessed October 30, 2025, <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/article/download/17033/pdf>
 29. (PDF) The Treaty of Hudaibiyah: Understanding Islamic History Through Diplomacy and Negotiation - ResearchGate, accessed October 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/372743990_The_Treaty_of_Hudaibiyah_Understanding_Islamic_History_Through_Diplomacy_and_Negotiation
 30. Occupied Palestinian Territory - OCHA, accessed October 30, 2025, <https://www.unocha.org/occupied-palestinian-territory>
 31. MSF response to the Israel-Gaza war | Doctors Without Borders – USA, accessed October 30, 2025, <https://www.doctorswithoutborders.org/latest/our-response-israel-gaza-war>
 32. Occupied Palestinian Territory (oPt) | The IRC - International Rescue Committee, accessed October 30, 2025, <https://www.rescue.org/country/occupied-palestinian-territory-opt>
 33. MSF operations in Gaza | Doctors Without Borders - USA, accessed October 30, 2025, <https://www.doctorswithoutborders.org/msf-operations-gaza>
 34. occupied Palestinian territory | ReliefWeb, accessed October 30, 2025, <https://reliefweb.int/country/pse>
 35. Anera: Help Refugees In Palestine, Jordan & Lebanon, accessed October 30, 2025, <https://www.anera.org/>
 36. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory, accessed October 30, 2025, <https://www.ochaopt.org/>
 37. Humanitarian Situation Update - Publications | United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory, accessed October 30, 2025, <https://www.ochaopt.org/publications/humanitarian-situation-update>
 38. What is the mandate of UNRWA?, accessed October 30, 2025, <https://www.unrwa.org/what-mandate-unrwa-0>
 39. UNRWA - Wikipedia, accessed October 30, 2025, <https://en.wikipedia.org/wiki/UNRWA>
 40. Frequently asked questions - UNRWA, accessed October 30, 2025, <https://www.unrwa.org/who-we-are/frequently-asked-questions>
 41. Israel/Palestine: An Abyss of Human Suffering in Gaza | Human Rights Watch, accessed October 30, 2025, <https://www.hrw.org/news/2025/01/16/israel/palestine-abyss-human-suffering-gaza>
 42. Israel's new laws banning UNRWA already taking effect | United Nations in Palestine, accessed October 30, 2025, <https://palestine.un.org/en/288442-israel%E2%80%99s-new-laws-banning-unrwa-already-taking-effect>
 43. Keep UNRWA Alive in Gaza and the West Bank - International Crisis Group, accessed October 30, 2025, <https://www.crisisgroup.org/middle-east-north->

- [africa/east-mediterranean-mena/israelpalestine/keep-unrwa-alive-gaza-and-west](#)
44. About Anera | Palestinian Refugee Aid Organization, accessed October 30, 2025, <https://www.anera.org/who-we-are/>
 45. Rating for Anera - Charity Navigator, accessed October 30, 2025, <https://www.charitynavigator.org/ein/520882226>
 46. American Near East Refugee Aid (ANERA) SAVE - Charity Watch, accessed October 30, 2025, <https://www.charitywatch.org/charities/american-near-east-refugee-aid-anera>
 47. The Legal Status of the West Bank and Gaza - Question of Palestine - UN.org., accessed October 30, 2025, <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-203742/>
 48. Israel's unlawfully prolonged occupation: consequences under an integrated legal framework | ECFR, accessed October 30, 2025, https://ecfr.eu/publication/israels_unlawfully_prolonged_occupation_7294/
 49. PALESTINIAN SELF-DETERMINATION: LAND, PEOPLE, AND PRACTICALITY - ohchr, accessed October 30, 2025, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/ps/sr-selfdetermination/2022-07-07/Palestinian-Self-Determination.pdf>
 50. The Colonial Order Prevails in Palestine: The Right to Self-Determination from a Third World Approach to International Law, accessed October 30, 2025, <https://yjil.yale.edu/posts/2025-07-14-the-colonial-order-prevails-in-palestine-the-right-to-self-determination-from-a>
 51. Right of Self-Determination of the Palestinian People - Question of Palestine - UN.org., accessed October 30, 2025, <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-196558/>
 52. The ICJ Obligations of Israel Advisory Opinion: A Quasi-Occupying Power?, accessed October 30, 2025, <https://lieber.westpoint.edu/icj-obligations-israel-advisory-opinion-quasi-occupying-power/>
 53. Legal Consequences arising from the Policies and Practices of ..., accessed October 30, 2025, <https://www.icj-cij.org/case/186>
 54. The Bottom Line of the ICJ's UNRWA Advisory Opinion - EJIL: Talk!, accessed October 30, 2025, <https://www.ejiltalk.org/the-bottom-line-of-the-icjs-unrwa-advisory-opinion/>
 55. Two States, Together: An Alternative Vision for Palestinians and Israelis, accessed October 30, 2025, <https://tcf.org/content/report/two-states-together-an-alternative-vision-for-palestinians-and-israelis/>
 56. Occupation - EJIL: Talk!, accessed October 30, 2025, <https://www.ejiltalk.org/category/occupation/>
 57. 1 Apartheid in the Occupied West Bank: A Legal Analysis of Israel's Actions Joint Submission to the United Nations Independent - Harvard Law School | Human Rights Program, accessed October 30, 2025, <https://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2022/03/IHRC-Addameer-Submission-to-HRC-COI-Apartheid->

- [in-WB.pdf](#)
58. WHAT IS BDS?, accessed October 30, 2025, <https://bdsmovement.net/what-bds>
 59. Publications | B'Tselem, accessed October 30, 2025, <https://www.btselem.org/publications>
 60. Statistics on Palestinians in Israeli custody - B'Tselem, accessed October 30, 2025, https://www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisoners
 61. Statistics on Palestinians from the Gaza Strip in Israeli custody | B'Tselem, accessed October 30, 2025, https://www.btselem.org/statistics/gaza_detainees_and_prisoners
 62. Statistics on administrative detention in the Occupied Territories | B'Tselem, accessed October 30, 2025, https://www.btselem.org/administrative_detention/statistics
 63. Human rights in Palestine (State of) - Amnesty International, accessed October 30, 2025, <https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/middle-east/palestine-state-of/report-palestine-state-of/>
 64. Protesters rally against Israel ceasefire violations - The Daily Cardinal, accessed October 30, 2025, <https://www.dailycardinal.com/article/2025/10/protesters-rally-against-israel-ceasefire-violations>
 65. Pro-Palestinian students threaten to sue US university amid antisemitism definition controversy, accessed October 30, 2025, <https://www.theguardian.com/us-news/2025/oct/29/george-mason-university-virginia-ihra-antisemitism-definition>
 66. Full article: The right to boycott: BDS, law, and politics in a global ..., accessed October 30, 2025, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20414005.2019.1672134>
 67. Anti-BDS Laws and the Politics of Political Boycotts - Penn Carey Law: Legal Scholarship Repository, accessed October 30, 2025, https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/jlasc/article/1282/&path_info=Anti+BDS+20Laws+20and+20the+20Politics+20of+20Political+20Boycotts.pdf
 68. □ Academic freedom and the anti-Israeli BDS movement - The Loop: ECPR's political science blog, accessed October 30, 2025, <https://theloop.ecpr.eu/academic-freedom-and-the-anti-israeli-bds-movement/>
 69. Applied Anti-Semitism: The BDS Movement and the Abuse of Corporate Social Responsibility - Digital Commons @ Touro Law Center, accessed October 30, 2025, <https://digitalcommons.tourolaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2911&context=lawreview>
 70. Jewish Voice for Peace, accessed October 30, 2025, <https://www.jewishvoiceforpeace.org/>
 71. The Anti-Defamation League Is Not What It Seems - Boston Review, accessed October 30, 2025, <https://www.bostonreview.net/articles/emmaia-gelman-anti-defamation-league/>

72. Interfaith Discussion on Israel's Apartheid against Palestinians | Human Rights Watch, accessed October 30, 2025, <https://www.hrw.org/news/2023/08/25/interfaith-discussion-israels-apartheid-against-palestinians>
73. Faithwashing and the Censorship of Palestine Advocacy in Interfaith Engagement, accessed October 30, 2025, <https://www.mpac.org/article/faithwashing-and-the-censorship-of-palestine-advocacy-in-interfaith-engagement/>
74. The Quranic Concept of War1 - Institute for Security Policy and Law, accessed October 30, 2025, <https://securitypolicylaw.syr.edu/wp-content/uploads/2013/03/MyersJoseph.Quranic-Concept-of-War.pdf>
75. "The Qur'an and War: Observations on Islamic Just War" - Royal Air Force, accessed October 30, 2025, <https://www.raf.mod.uk/what-we-do/centre-for-air-and-space-power-studies/aspr/apr-vol13-iss3-3-pdf/>
76. (PDF) The Concept of Social Justice and Integrity in Testimony according to Islam: A Thematic Study of Surah Al-Maidah Verse 8 - ResearchGate, accessed October 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/391533495_The_Concept_of_Social_Justice_and_Integrity_in_Testimony_according_to_Islam_A_Thematic_Study_of_Surah_Al-Maidah_Verse_8
77. The Relevance of the Concept of Justice in Islamic Law to Contemporary Humanitarian Issues - Semantic Scholar, accessed October 30, 2025, <https://pdfs.semanticscholar.org/ff33/0c5234c12d3db5cc058cab7deec63b126ac.pdf>
78. (PDF) FREEDOM OF RELIGION IN QUR'ANIC PERSPECTIVES: THE INCLUSIVE INTERPRETATIONS OF CONTEMPORARY MUSLIM SCHOLARS - ResearchGate, accessed October 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/322838116_FREEDOM_OF_RELIGION_IN_QUR'ANIC_PERSPECTIVES_THE_INCLUSIVE_INTERPRETATIONS_OF_CONTEMPORARY_MUSLIM_SCHOLARS
79. Thinking Palestine Through Islam: The Mirage of Secular Dissent as Epistemic Resistance Against Israel - Traversing Tradition, accessed October 30, 2025, <https://traversingtradition.com/2023/11/20/thinking-palestine-through-islam-the-mirage-of-secular-dissent-as-epistemic-resistance-against-israel/>
80. Surah Al-Anbiya Ayat 107 (21:107 Quran) With Tafsir - My Islam, accessed October 30, 2025, <https://myislam.org/surah-al-anbiya/ayat-107/>
81. Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Al-Quran Surah Al-Anbiya' Ayat 107 & An-Nahl Ayat 97 - e-journal UIN Suka., accessed October 30, 2025, <https://journal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/HJIE/article/download/5326/2441>
82. Sajid's Reflection on Surah Al-Anbiyaa:107 | QuranReflect, accessed October 30, 2025, <https://quranreflect.com/posts/5833>
83. (PDF) The Idea of Rahmatan Lil 'Alamin (A Mercy for the Whole World) and How It Connects to the Implementation of Fiqh Al-Ta'ayush in Da'wah Within Plural

- Society - ResearchGate, accessed October 30, 2025, <https://www.researchgate.net/publication/393714576> The Idea of Rahmatan Lil 'Alamin A Mercy for the Whole World and How It Connects to the Implementation of Fiqh Al-Ta'ayush in Da'wah Within Plural Society
84. The Idea of Rahmatan Lil 'Alamin (A Mercy for the Whole World) and ..., accessed October 30, 2025, <https://rsisinternational.org/journals/ijriss/articles/the-idea-of-rahmatan-lil-alamina-mercy-for-the-whole-world-and-how-it-connects-to-the-implementation-of-fiqh-al-taayush-in-dawah-within-plural-society/>
 85. The Peace Message of Islam Rahmatan Lil Alamin: A Pathway to Resolving Conflict and Genocide in Palestine through Political Exeg, accessed October 30, 2025, <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/AJIS/article/download/10363/3281/40202>
 86. Jihad | Meaning, Examples, & Use in the Quran - Britannica, accessed October 30, 2025, <https://www.britannica.com/topic/jihad>
 87. Jihad - Wikipedia, accessed October 30, 2025, <https://en.wikipedia.org/wiki/Jihad>
 88. Jihad in Islamic History: Doctrines and Practice | Department of Near Eastern Studies, accessed October 30, 2025, <https://nes.princeton.edu/publications/jihad-islamic-history-doctrines-and-practice>
 89. Jihād as Defense: Just-war theory in the Quran ... - Yaqeen Institute, accessed October 30, 2025, <https://yaqeeninstitute.org/wp-content/uploads/2017/01/Jihad-and-Self-Defense.pdf>
 90. Evolving Approaches to Jihad: From Self-defense to Revolutionary and Regime-Change Political Violence, accessed October 30, 2025, <https://securitypolicylaw.syr.edu/wp-content/uploads/2013/03/Bassiouni.Evolving-Approaches-to-Jihad.pdf>
 91. The collective boycotting, a ruler's prerogative | The official website of Sheikh Muhammad Ali FERKUS, accessed October 30, 2025, <http://www.ferkous.app/home/?q=en/art-mois-en-15>
 92. Economic Boycott from the Islamic Law Perspective: A Post-Tūfān al-'Aqṣā Case Study, accessed October 30, 2025, <https://doaj.org/article/3b44eef6d63a4d48bc4847a1121ece77>
 93. Perception and Interpretation Problems of Contemporary Approaches of the Concept of Jihad* - Dergipark, accessed October 30, 2025, <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/993140>
 94. Jihad in a World of Sovereigns: Law, Violence, and Islam in the Bosnia Crisis, accessed October 30, 2025, <https://www.cambridge.org/core/journals/law-and-social-inquiry/article/jihad-in-a-world-of-sovereigns-law-violence-and-islam-in-the-bosnia-crisis/AE17B279722A72F15CFED6894F02FF1A>
 95. Islamic Political Thought and the "Constitution of Medina" - Scholars@Duke publication, accessed October 30, 2025, <https://scholars.duke.edu/publication/1612627>
 96. the implementation of the medina constitution in modern state administration: a

- theoretical viewpoint - ResearchGate, accessed October 30, 2025,
<https://www.researchgate.net/publication/353889353> THE IMPLEMENTATION OF THE MEDINA CONSTITUTION IN MODERN STATE ADMINISTRATION A THEORETICAL VIEWPOINT
97. The "Constitution" of Medina: Translation, Commentary, and ..., accessed October 30, 2025, <https://yaqeeninstitute.org/read/paper/the-constitution-of-medina-translation-commentary-and-meaning-today>
 98. The Medina Charter and Lessons of Multiculturalism in Contemporary Islamic Politics, accessed October 30, 2025,
<https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/negrei/article/view/11387>
 99. The Medina Charter and Lessons of Multiculturalism in Contemporary Islamic Politics, accessed October 30, 2025,
<https://www.researchgate.net/publication/388304078> The Medina Charter and Lessons of Multiculturalism in Contemporary Islamic Politics
 100. View of The Medina Charter and Lessons of Multiculturalism in Contemporary Islamic Politics - Umea' Jurnal IAIN Curup, accessed October 30, 2025,
<https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/negrei/article/view/11387/3115>
 101. THE ISLAMIC INFLUENCE IN MOULDING AND SHAPING ... - IIUM, accessed October 30, 2025,
<https://journals.iium.edu.my/iiumlj/index.php/iiumlj/article/download/974/476/3748>
 102. International Treaties (Mu'âhadât) in Islam: Theory and Practice in Light of Islamic International Law (Siyar) according to, accessed October 30, 2025,
<https://ajis.org/index.php/ajiss/article/download/1354/624>
 103. The Role of Treaties in Islamic and Modern International Law: A Comparative Analysis, accessed October 30, 2025,
<https://www.electronicpublications.org/stuff/1050>
 104. The Impact of the Treaty of Hudaibiyyah on the Spread of Islam in the Arabian Peninsula, accessed October 30, 2025,
<https://www.researchgate.net/publication/391500919> The Impact of the Treaty of Hudaibiyyah on the Spread of Islam in the Arabian Peninsula
 105. Of War and Peace: The Hudaibiya Model of Islamic Diplomacy, accessed October 30, 2025,
<https://scholarship.law.ufl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1447&context=fjil>